

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# **MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi  
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*

**OLEH**

**PUTRI SEPTINI HARAHAHAP**  
**NIM. 01770625279**



**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : PUTRI SEPTINI HARAHAP  
 NIM : 01770625279  
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN  
 PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH  
 BENDAHARA PENGELUARAN BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pekanbaru, 2 November 2020

Disetujui oleh :

**PEMBIMBING**

Afrizal, S.Sos., M.Si

NIP. 19690419 200701 1 025

**MENGETAHUI :**

**DEKAN**



Dr.Drs.H.Muh.Said, HM, M.Ag,MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA PRODI**

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : PUTRI SEPTINI HARAHAP

NIM : 01770625279

PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL : MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARA PENEGLUARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU

TANGGAL UJIAN : 13 NOVEMBER 2020

Pekanbaru, November 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

DR. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
NIP. 19790101 200710 1003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Alchudri, SE. Ak. CA.CPA  
NIP. 19721125 200710 1002

PENGUJI II

Dr. Muhammad April, M.Hum  
NIK. 130711072



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**Oleh : PUTRI SEPTINI HARAHAHAP**

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang berlangsung sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer, penulis peroleh dari pegawai Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, sedangkan data sekundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku referensi yang berhubungan dengan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran. PPh Pasal 22 dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi. Pembayaran yang jumlahnya diatas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dikenai PPh Pasal 22 oleh Bendahara. Pelaporan pajak merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi yang diberikan pajak negara terhadap pembangunan negara atau elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah.

**Kata kunci : *Mekanisme, Perhitungan, Pelaporan, PPH Pasal 22, Pembelian Barang, Bendahara.***





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU”**. Adapun penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Orangtua yang selalu memberikan doa, motivasi, kasih sayang dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini..
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag , MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS,SE, M.Si. Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan wawasan serta ilmu yang bermanfaat yang tidak dapat dinilai secara materi.
8. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk penulis.
9. Seluruh pegawai di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang telah mengizinkan untuk mengambil data dan telah memberikan banyak bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Semua teman-teman yang telah mensupport dan memberikan motivasi untuk penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, September 2020

PUTRI SEPTINI HARAHAHAP  
NIM. 01770625279



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DATAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	5
1.4.2 Waktu Penelitian .....	5
1.4.3 Jenis Data .....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.4.5 Analisis Data .....	8
1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI</b>	
2.1. Sejarah Berdirinya BAPPEDA Provinsi Riau .....	10
2.2. Visi dan Misi .....	11
2.3. Uraian Tugas ( <i>Job description</i> ) Bagian/ Unit Kerja.....	12
2.4. Struktur Organisasi Unit Kerja .....	14
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1 Tinjauan Teori .....	15
3.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum .....	15
3.1.2 Fungsi Pajak .....	16
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	17
3.1.4 Jenis Pajak .....	19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5 Tarif Pajak .....	22
3.1.6 Pajak Penghasilan .....	23
3.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	23
3.1.8 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	24
3.1.9 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	24
3.1.10 Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 22.....	25
3.1.11 Kegiatan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22.....	27
3.1.12 Dasar dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal .....	27
3.1.13Pajak Menurut Islam.....	29
3.2 Tinjauan Praktek.....	31
3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian barang oleh BAPPEDA Provinsi Riau...	
3.2.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian barang oleh BAPPEDA Provinsi Riau...	33
3.2.3 Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan TinjauanPraktek.....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	39
4.2. Saran .....	40

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2019 .....	2
Tabel 3.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	22
Tabel 3.2 Tarif Pemungut PPH Pasal 22 .....	28
Tabel 3.3 Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Provinsi Riau .....	32
Tabel 3.4 Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak .....	35
Tabel 3.5 Perbandingan Teori dengan Praktek.....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Struktur Organisasi Unit Kerja .....	14
Gambar 3.1 Flowchart Pelaporan PPH Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada BAPPEDA Provinsi Riau .....	37





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah, masih banyak para wajib pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Beragama upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya berasal dari sektor pajak.

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan didalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (Negara) berusaha untuk menyediakan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi segala kebutuhan rakyat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin banyaknya investasi dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara investor, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sangat serius untuk mengarahkan dan mengingatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Berikut penulis sajikan uraian pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019.

**Tabel 1.1 Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019**

No	Tanggal Terima/Setor	Uraian	Harga Barang (sudah termasuk PPN)
1	25-02-2019	Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor	Rp. 3.556.281
2	13-03-2019	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Persediaan Kantor	Rp. 2.553.360
3	30-05-2019	Belanja Penggandaan	Rp. 1.293.128

Sumber : Data Olah BAPPEDA Provinsi Riau

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tanggal 25 februari 2019 melakukan pembelian Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor dengan harga Rp. 3.556.281. Pada tanggal 13 Maret 2019 melakukan pembelian Alat Tulis Kantor untu persediaan kantor dengan harga Rp. 2.553.360. Kemudian pada tanggal 30 Mei melakukan belanja Penggandaan dengan harga Rp. 1.293.128.

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada Negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari 2 sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Disisi lain bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memeberikan konstribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang ada dan menjadi sumber penerimaan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas.

Maka pihak Bendaharawan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban menghitung dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Terkait dari penjelasan di atas, sangat di sayangkan dalam pelaksanaannya PPh Pasal 22 sering terjadi penyelewengan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, perhitungan dan pelaporan pajak yang tidak sesuai dan tepat waktu, dimana hal tersebut bisa merugikan penerimaan Negara. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik taerhadap tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan suatu badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai suatu usaha untuk menjamin lajunya perkembangan ,keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah melakukan pembelian barang yang tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukannya tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bappeda dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 khususnya terhadap pembelian barang dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah?

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan dan informasi.
2. Bagi pemerintah, penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak rekanan pemerintah tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPh pasal 22 yang sesuai dengan peraturan sebagai alat ukur pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 yang selama ini mereka lakukan.
3. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi bagi pembaca maupun sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintahan yaitu kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yang terhitung sejak Maret sampai April 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.3 Jenis Data

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek pajak yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan staf Bendahara BAPPEDA Provinsi Riau.

#### 2. Data Sekunder

Data skunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-cattan yang berhubungan dengan penelitian. Dan contoh data skunder yang diperoleh penulis adalah:

##### a. Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak digunakan sebagai bukti potong terhadap bukti PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara pengeluaran. Dari SSP dapat diperoleh informasi tentang besarnya pajak yang terutang.

##### b. Daftar Pemungutan PPh Pasal 22

Dokumen daftar PPh pasal 22 ini berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan rekanan tentang besarnya PPh pasal 22 yang dipungut dan disetor oleh bendahara pengeluaran.

##### c. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar berisikan tentang nama barang yang dikenakan PPN sekaligus PPh pasal 22 dan jumlah yang harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayarkan setelah dikurangi dengan PPN dari faktur pajak ini dapat memperoleh informasi tentang dasar pengenaan pajak yang dijadikan sebagai dasar pemungutan PPh pasal 22.

#### d. Formulir Setoran Pajak

Formulir yang digunakan oleh bendahara BAPPEDA Provinsi Riau dalam menyetorkan PPh pasal 22 adalah formulir dari bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan PT POS Indonesia. Dari formulir setoran ini penulis dapat menentukan apakah besarnya PPh pasal 22 yang disetor sesuai dengan PPh pasal 22 yang dipotong seperti yang tercantum didalam SSP dan dokumen tersebut diperoleh dari Bank atau Pos Indonesia.

### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 di BAPPEDA Provinsi Riau.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan Tanya jawab dengan para staff bagian Bendahara BAPPEDA Provisi Riau dan pihak rekanan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemanfaatan dat-data yang diperoleh seperti dokumen, catatan/arsip dari instansi. Penulis mempelajari dokumen,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan/arsip yang terkait pajak penghasilan pasal 22 yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau.

#### 4. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca buku literature yang ada hubungannya dengan laporan tugas akhir ini. Dengan metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis buku-buku yang terkait dengan perpajakan seperti Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya serta buku dengan tema perpajakan.

##### 1.4.5 Analisis Data

Adapun analisis data, penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan deskriptif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang menggunakan penjelasan secara detail dengan melakukan pengolahan data.

#### 1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian jelas mengenai dasar suatu penulisan.

Adapun sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROVINSI RIAU**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau, kemudian menjelaskan program dan sasaran organisasi kantor, struktur organisasi, serta uraian singkat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini penulis perlu membahas tentang pengertian pajak, dasar hukum, jenis-jenis pajak, pengertian PPh pasal 22, tarif PPh pasal 22, tata cara perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis buat berdasarkan data yang diperoleh

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Sejarah Berdirinya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau merupakan suatu badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai suatu usaha untuk menjamin lajunya perkembangan ,keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah.Landasan dasar dan Kronologi pembentukan kelembagaan Bappeda Provinsi Riau dan personil adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang susunana Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts 94/VII/75 tentang pembentukan badan perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat 1 Riau,Tanggal 23 Juli 1975,ditanda tangani oleh Gubernur Riau Arifin Ahmad Ketua Bappeda Tingkat 1 Riau pertama kali dijabat oleh Bapak Drs.Rivaie Rachman dengan jumlah personil 25 orang yang terdiri unsur Setwilda Tingkat 1,Perguruan Tinggi dan Dinas Instansi
4. Pengangkatan Pegawai Bppeda sebanyak 14 orang pada tahun 1976
5. Kantor Bappeda menumpang di Gedung kantor BUCD (Badan Urusan Cees Daerah) Jalan Cut Nyak Dien Pada Tanggal 15 Juli 1976



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

6. Kepres No.27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Bappeda dan Mencabut Kepres No.15 1974
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.183 Tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan II
8. Peraturan Daerah No.3 Tahun 1983 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I Riau
9. Surat Keputusan Gubernur Riau Tanggal 29 Mei 1985 Tentang Personil Bappeda Dari Unsur Perguruan tinggi dan Pemda
10. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau No.Kpts 638/IX/1992 Tanggal 24 September 1992, Tentang Pengembalian Pegawai Negeri Sipil/ Dosen Dari Universitas Riau Yang Bekerja Pada Bappeda Tingkat I Riau
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau

## 2.2 Visi dan Misi

### 2.2.1 Visi

Visi Bappeda sesuai RENSTRA Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu : "Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Penjabaran dari visi tersebut yaitu:

1. Berkualitas adalah tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangun
2. Profesional menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern
3. Integritas menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

### 2.2.2 Misi

Adapun Misi Bappeda yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional
3. Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

### 2.3 Uraian Tugas (*Job description*) Bagian/ Unit Kerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau memiliki tugas sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

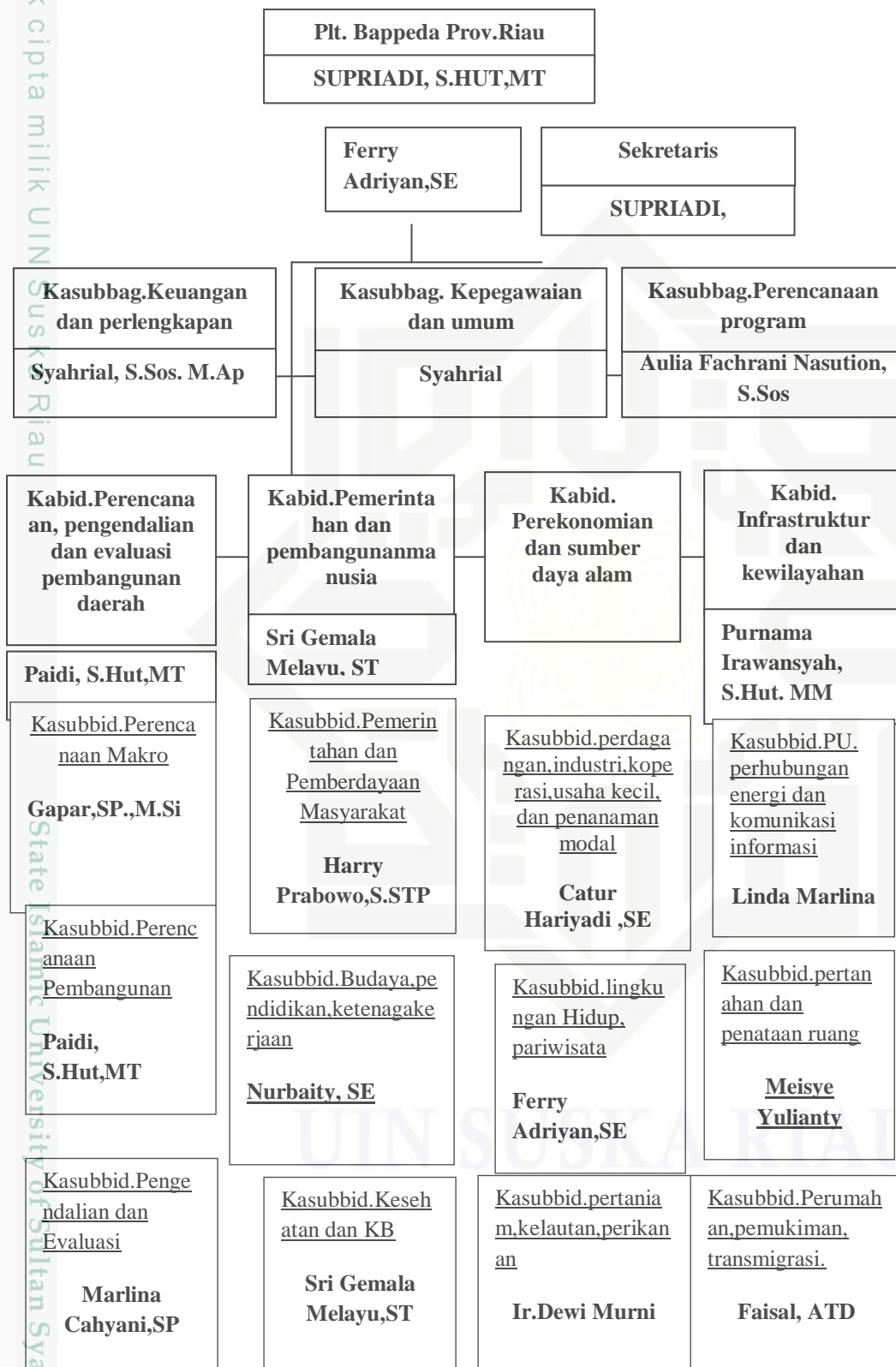
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Subbidang Keuangan dan Perlengkapan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
4. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
5. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
7. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
8. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
9. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
10. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan pengguna barang;
11. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.4 Struktur Organisasi Unit Kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut seperti atas transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungutan PPh Pasal 22 dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengumpulkan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan dan pengenaan pajak yang tepat waktu.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotong atau pemungut oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong/pemungut akan menyeteror dan melaporkan pajak yang telah di potong.

PPh Pasal 22 dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. PMK Nomor 34/PMK.010/2017 bahwa pembelian barang oleh pemerintah dikenakan tarif 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN). Apabila wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka besar tarif pemungutan dinaikkan 100%.

#### Pelaporan PPh Pasal 22

1. Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke Kantor

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Pajak atau Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan terakhir.

2. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pemungut pajak (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) wajib melaporkan hasil pungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya (PMK No.80/PMK.03/2010).
4. Pemungut pajak (Bendahara) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir (PMK No.80/PMK.03/2010).
5. Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh , wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir (PMK No.80/PMK.03/2010).

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu :

1. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 22 terhadap pembelian barang yang dilakukan BAPPEDA sebaiknya lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan perhitungan.
2. Dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak PPh Pasal 22 yang dikenakan atas pembelian barang oleh Bendahar BAPPEDA Provinri Riau tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak ada denda atau peringatan.



## DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 965/ KMK.04/1983

Mardiamo. 2013. “ *Perpajakan-Edisi Revisi*”. Andi : Yogyakarta.

Mardiamo. 2019. “ *Perpajakan-Edisi 2019*”. Andi : Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/ PMK.05/ 2016

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pohan, Chairil Anwar. 2017. “ *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 2*”. Mitra Wacana Media : Jakarta.

Resmi, Siti. 2017. “ *Perpajakan Teori dan Kasus*”. Salemba Empat : Jakarta.

Vince, Nita dan Arridho Abduh. 2018. “ *Pajak Penghasilan di Indonesia*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau : Pekanbaru.

Wahyuni, Nita. 2018. “ *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau : Pekanbaru.

Waluyo. 2016. “ *Akuntansi Pajak*”. Salemba Empat : Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2019. “ *Perpajakan Indonesia*”. Salemba Empat : Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 22 Di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana Pelaporan PPh Pasal 22 Di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau?
3. Apa-apa saja barang yang dikenakan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Bappeda ?
4. Berapa tarif PPh Pasal 22 terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan?
5. Apa sanksi keterlambatan Pelaporan Pajak?
6. Kapan batas penyampaian SPT masa PPh Pasal 22 atas belanja barang oleh Bendahara Pengeluaran Bappeda?
7. Apa dasar hukum yang digunakan Bappeda untuk menentukan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pengeluaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Riau?
8. Adakah kendala yang terjadi dalam melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pengeluaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau?
9. Apa yang dilakukan Bappeda untuk mengatasi kendala tersebut?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/1071/2020  
: Biasa  
: -  
: **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 17 Februari 2020 M  
22 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
Yth. **Afrizal, S. Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Putri Septini Harahap  
NIM : 01770625279  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1072/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 17 Februari 2020 M  
22 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat


Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Putri Septini Harahap  
NIM. : 01770625279  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
/ Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Sifat

Lampiran

Hal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Gajah Mada Telp. (0761) 36031-36032 Fax. (0761) 36035

e-mail : sekretariat@bappeda.riau.go.id

**PEKANBARU**

**SURAT KETERANGAN**

**NO : 050/BAPPEDALITBANG-SEER/1168**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	<b>NURHAYATI, S.Pi, M.Sc</b>
NIP.	:	19720518 199803 2 006
Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Bappedalitbang Provinsi Riau

Menerangkan bahwa :

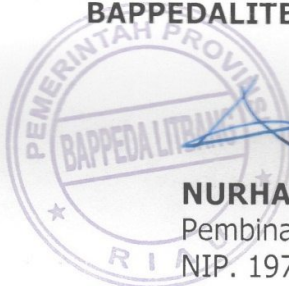
Nama	:	<b>PUTRI SEPTINI HARAHAHAP</b>
NIM	:	01770625279
Fakultas	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
Jurusan	:	DIII Perpajakan
Jenjang	:	DIII
Judul	:	Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan riset di BAPPEDALITBANG Provinsi Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Oktober 2020

**Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum**  
**BAPPEDALITBANG Provinsi Riau,**



**NURHAYATI, S.Pi, M.Sc**

Pembina

NIP. 19720518 199803 2 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Putri Septini Harahap dilahirkan didesa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas pada tanggal 19 September 1998. Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Syarifuddin Harahap dan Ibunda Mardihani Harahap. Jenjang pendidikan dasar dimulai pada tahun 2005 di SD Madrasah Ibtidaiya Negeri (MIN) Sibuhuan Kabupaten Padang

Lawas, selanjutnya pada 2011 melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTsN) Sibuhuan. Lalu pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Barumun mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan lalu tamat pada tahun 2017. Tahun 2017 mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam mengikuti jalur Mandiri dan diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada Bulan Juli sampai Agustus 2019 melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir yaitu : **“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Provinsi Riau.”**